

## Harga Bahan Pokok Naik Setiap Hari, Pedagang Pasar Serpong Sepi Pembeli

**SERPONG (IM)** - Harga-harga bahan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik.

Pedagang menyebut kenaikan sejumlah barang pangan terjadi setiap hari. Sehingga mengerek pelemahan daya beli masyarakat saat ini.

Seperti diungkap Herman, penjual sayur mayur di pasar Serpong, Tangerang Selatan.

Dia berharap kenaikan sayur mayur tidak terjadi berkala, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pedagang.

"Kita pedagang bingung menjual ke pelanggan, karena dari pemasok setiap hari naik," ucapnya ditemui Kamis (3/3).

Dia menyebutkan saat ini, harga aneka cabai dari pemasok terus menaikkan harga. Mau tidak mau, dirinya juga menaikkan harga tanpa kepastian.

"Dari dua hari kemarin naik, kita khawatir kalau begini harga cabai akan terus naik, mungkin bisa sampai puasa nanti," jelasnya. Herman menerangkan, saat ini harga cabai keriting, cabai merah dan rawit mulai merangkak naik.

Untuk cabai merah saja mengalami kenaikan sampai hari ini sebesar Rp3000 per kilogram

menjadi Rp38 ribu dari sebelumnya Rp35 ribu per kilogram.

"Kita pedagang maunya harga stabil. Kalaupun ada kenaikan sekali saja, jangan dicilil begini, kita pedagang jadi bingung," ucap dia.

Sementara itu, Asrap (53), pedagang ayam potong di pasar Serpong, juga mengeluhkan hal yang sama.

Dia berharap Pemerintah segera bisa menstabilkan harga dan mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

"Setiap hari naik seribu, sekarang ayam potong sekilo itu seharga Rp 30 ribu sebelumnya 28 per kilogram, engga tahu besok naik lagi atau engga," jelas dia.

Karena harga yang tidak stabil dan aksi mogok pedagang daging, Asrap mengaku aktivitas perniagaan di pasar Serpong, diakuinya tidak begitu bergairah. Sebab, biasanya dia mampu menjual sekitar 100 ekor ayam potong saat ini hanya dikisaran 20 sampai 30 ekor saja.

"Sekarang pedagang daging mogok berjualan, pedagang yang lain juga terdampak. Mudah-mudahan harga-harga bisa stabil, pembeli semakin banyak," tutupnya. ● pp

DIRIKAN DAPUR UMUM UNTUK KORBAN BANJIR

## Pemprov Banten Layani 7.500 Nasi Bungkus Per Hari

**SERANG (IM)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Sosial mendirikan dapur umum di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH Syam'un No.5 Kota Serang untuk bantu korban banjir Kota Serang yang terjadi Selasa (1/3) kemarin. Per hari ini, Dapur Umum Pemprov Banten melayani hingga 7.500 nasi bungkus untuk para korban banjir.

"Kemarin kita melayani 3.500 nasi bungkus. Hari ini, kita melayani antara 6.000 hingga 7.500 bungkus. Untuk pagi, siang, dan sore masing-masing sekitar 2.500 bungkus," ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhanna usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir yang dipimpin Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (2/3).

"Nasi bungkus disalurkan

pada 26 titik pengungsian," tambahanya.

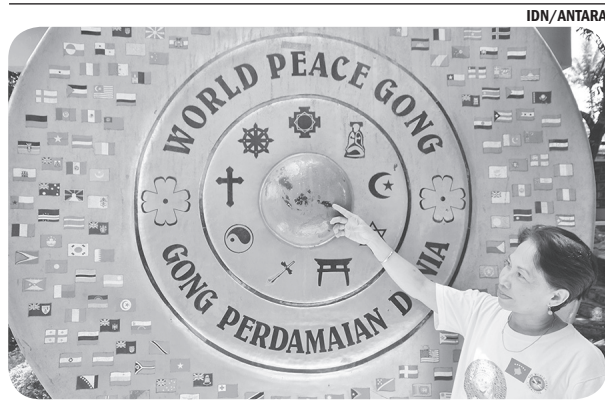
Dikatakan, untuk stok beras Dinas Provinsi Banten siap.

Sedangkan bahan lauk pauk dan bumbu merupakan sumbangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Banten.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wali Kota Serang, Syafrudin mengungkapkan banjir terjadi pada 43 titik kampung dan perumahan. Sebanyak 2.900 KK terdampak oleh banjir dan menelan 5 korban jiwa.

"Bantuan yang dibutuhkan adalah pembenahan infrastruktur dan bantuan Posko Induk dari BPBD. Saya mohon perhatian dari Provinsi dari sisi sosial dan lain-lain," ungkap Syafrudin.

Dalam rapat itu, Wagub Andika Hazrumy juga menegaskan, Dapur Umum Pemprov Banten akan berdiri dan melayani selama Kota Serang masih membutuhkan bantuan. ● pra



**MUSEUM GONG PERDAMAIAN DUNIA DI JEPARA** Pengelola Gong Perdamaian Dunia atau "World Peace Gong" Sri Kusmiah menunjukkan peta dunia di Desa Plajan, Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah, Rabu (2/3). Gong Perdamaian Dunia yang menjadi destinasi wisata internasional yang dibuat pada 2002 setelah peristiwa "Bom Bali 1" oleh Djuyoto Suntani warga Jepara sekaligus Presiden Komite Perdamaian Dunia itu sebagai seruan ajakan perdamaian kepada seluruh umat manusia di muka bumi.

GARA-GARA BPNT DISALURKAN VIA KANTOR POS

## Ribuan Agen E Warong di KBB Terancam Bangkrut

**BANDUNG (IM)** - Nasib nahas dialami ribuan agen E Warong di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ribuan agen E Warong di KBB itu terancam gulung tikar dan kini sedang harap-harap cemas menanti bantuan perbaikan nasib mereka.

Penyebabnya adalah perubahan kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari Kemensos terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membuat ribuan agen E Warong itu menjerit.

Pasalnya, BPNT yang disalurkan kini berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan dan pencairannya bakal dilakukan melalui kantor pos.

Sementara untuk proses pencairannya sendiri dilakukan langsung selama tiga bulan, sehingga KPM bisa mendapat uang sebesar Rp600 ribu.

Perubahan itu tertuang dalam surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tertanggal 18 Februari 2022, nomor 592/G/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari-Maret 2022.

Agensi E Warong Shoffiyah Cililin, Deden mengatakan, selama ini BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme

akun elektronik. Menurutnya, bantuan itu digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong yang bekerjasama dengan bank.

"Bahkan, program tersebut bukan lagi disebut BPNT tapi bantuan sembako," katanya.

la menilai, dengan adanya kebijakan baru tersebut, KPM akhirnya bebas berbelanja di mana saja tanpa harus mendatangi e-warong.

"Imbasnya agen-agen yang selama ini menjadi penyalur sembako banyak yang kelimpungan, padahal di KBB jumlahnya ribuan," katanya.

Sementara itu, salah seorang KPM, Oom Komariah (68) lebih memilih membelanjakan uang BPNT di bekas agen karena kualitas barang yang dijual terjangkau. Selain itu dirinya bisa bebas belanja membeli apa saja kebutuhan yang mendesak dibutuhkan.

Dari total uang Rp 600 ribu yang diterimanya, sebut dia, habis buat berbelanja sembako Rp 300 ribu, sedangkan sisanya buat dibelikan gas, minyak goreng, dan sebagainya.

"Dari dulu saya biasa berbelanja di e-warong atau agen sekalipun sekarang dibebaskan berbelanja di mana saja, saya memilih belanja ke sini karena berasnya premium, telornya pun segar," pungkasnya. ● pur

# 8| Nusantara



## PELAKSANAAN HARI RAYA NYEPI TAHUN BARU SAKA 1944 DI BALI

Pecalang atau petugas pengamanan desa adat di Bali memantau situasi di area Monumen Kapten Anumerta Ida Bagus Putu Japa saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 di wilayah Desa Sumerta Kelod, Denpasar, Bali, Kamis (3/3). Pengamanan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 di desa tersebut untuk menjamin keamanan dan kelancaran umat Hindu dalam menjalani "catur brata penyepian" dengan tidak bekerja (amati karya), tidak bepergian (amati lelungan), tidak menyalakapi (amati geni) dan tidak bersenang-senang (amati lelungan) selama 24 jam yakni mulai Kamis (3/3) pukul 06.00 WITA hingga Jumat (4/3) pukul 06.00 WITA.

# Puncak Terus Dihantui Macet, Anggota DPR RI Ini Merasa Negara tak Hadir

Jalan Raya Puncak atau Kawasan Puncak tidak jauh dari Istana Presiden di Kota Bogor dan Istana Presiden di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Namun negara atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) tidak hadir dalam penguraian kemacetan di Kawasan Puncak, kata Mulyadi.

**PUNCAK (IM)** - Anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi merasa kasa negara tidak hadir atas macetnya lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Padahal, kata Mulyadi. Jalan Raya Puncak berada di tengah-tengah, di antara Istana Presiden di Kota Bogor dengan Istana Presiden di Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Mulyadi yang kerap dijuluki dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Puncak oleh koleganya tak putus semangat memperjuangkan penguraian kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak dan juga pemerataan kemajuan ekonomi masyarakat di wilayah Bogor Timur seperti di Kecamatan Sukamakmur yang berada di balik punggung Kawasan Puncak.

"Jalan Raya Puncak atau Kawasan Puncak tidak jauh dari Istana Presiden di Kota Bogor dan Istana Presiden di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Namun negara atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) tidak hadir dalam penguraian kemacetan di Kawasan Puncak," tegas Mulyadi kepada wartawan, Kamis (3/3).

Mulyadi menambahkan harusnya KemenPU-PR menggelontorkan anggarannya untuk membangun infrastruktur yang layak di Kabupaten Bogor, karena bagaimanapun Kabupaten Bogor bertetangga langsung dengan ibu kota negara Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta.

"Setiap liburan atau akhir pekan, wisatawan selalu membanjiri Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bahkan saat pandemi Covid-19 seperti pekan kemarin, di mana Kawasan Puncak dibanjiri kendaraan lalu lintas sebanyak 80 ribu unit," tambah Mulyadi.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan bahwa negara seperti gagap bahkan tidak hadir untuk mengatasi penderitaan jutaan anak bangsa yang hidup di wilayah tersebut, dan juga terhadap wisatawan nusantara yang ingin menikmati liburan murah.

"Kemacetan puncak bukan saja jadi penderitaan masyarakat di Kawasan Puncak seperti Ciawi, Megamendung dan Cisarua, tetapi juga bagi wisatawan hingga banyak kendaraan mereka yang mogok atau mengalami kerusakan hingga disebut liburan horor karena jarak tempuh Puncak-Jakarta mencapai 17 jam hingga menyaiks psikologis wisatawan dan bahkan ada warga yang sampai melahirkan di mobil karena terjebak macet," tuturnya.

Mulyadi menjelaskan sebagai anggota Komisi V DPR RI dapil Kabupaten Bogor yang bermitra dengan KemenPU-PR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dirinya sudah berulang kali menyampaikan masalah ini di ruang rapat komisi V DPR RI, baik dengan cara lembut hingga marah.

"Saya sudah berjuang, namun tetap saja hingga kini

tidak ada solusi konkret, jawaban KemenPU-PR maupun Kemenhub hanya retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran. Saya di Dapil Kabupaten Bogor seperti badut yang hanya menjadi penghibur sesaat, setelah itu tidak juga ada solusi atas kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak dan kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Sukamakmur dan sekitarnya," jelas Mulyadi.

"Saya tetap mengharapkan agar poyek pembangunan Jalan Puncak II atau poros tengah timur (PTT) dilaksanakan sebagai jalur alternatif menuju Cipanas, Kabupaten Cianjur. Lalu untuk jangka menengah dan pendek, KemenPU-PR bisa merevitalisasi jalur selatan dan utara serta solusi jangka pendek yaitu membangun bundaran atau flyover atau under pass di simpul kemacetan dan pelebaran sepanjang Jalan Raya Puncak, termasuk membuat jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah Jalan Tol Bocimi."

Jika harapan ini tidak juga di realisasikan, seperti yang pernah saya sampaikan di rapat Komisi V dengan Menteri dan Wamen PU-PR, maka kedepan saya hanya akan beraudiensi dengan Tuhan," harapnya. ● pp

## Dewan Pendidikan Harus Berinovasi untuk Memajukan Pendidikan

**BOGOR (IM)** - Bupati Bogor Ade Yasin berharap agar Dewan Pendidikan (DP) berinisiatif dan berinovasi demi pendidikan bermutu dan merata.

Hal ini disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin saat melantik 11 orang Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (2/3).

Hadir pada pelantikan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Kepala Dinas Pendidikan, Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Ketua Kadin Kabupaten Bogor.

Lebih jauh Ade Yasin menjelaskan, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan kewenangan yang penting dan strategis kepada Dewan Pendidikan, memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, pengawasan, evaluasi serta sebagai wadah aspirasi dan mediator antara masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas.

"Sebetulnya inisiatif yang lebih kami harapkan, jadi 11 anggota Dewan Pendidikan harus punya inisiatif terutama juga inovasi-inovasi



Dewan Pendidikan saat dilantik Bupati Bogor, Ade Yasin.

untuk pendidikan di Kabupaten Bogor. Saya kira yang terpilih ini mampu untuk melaksanakan itu, mampu turut serta dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Bogor," jelas Ade.

Ade menerangkan, urusan pendidikan tidak hanya urusan pemerintah daerah, tetapi juga urusan bersama, urusan kita, urusan masyarakat, urusan tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor.

"Saya kira mereka yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, peduli terhadap dunia pendidikan, yang mau berkontribusi baik pemikiran maupun tenaganya untuk pendidikan, saya kira layak dijadikan tokoh pendidikan di Kabupaten Bogor,"

terang Ade. Ade menyebutkan, kita juga harus secara terus menerus membuat pola pendidikan atau pengajaran yang efektif, baik secara jarak jauh maupun secara langsung. Hal inilah yang harus dirumuskan Dewan Pendidikan, membuat pola pendidikan di Kabupaten Bogor yang mampu membuat anak-anak kita menyerap pendidikan dengan baik, dan juga bisa beradaptasi di era digital.

"Mari bekerjasama mengatasi berbagai tantangan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata, agar tercapai cita-cita Karsa Bogor Cerdas, dan terwujudnya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban," ujarnya. ● gio

## Wakil Ketua DPRD Jabar: Milenial Harus Bisa Implementasikan 4 Pilar Kebangsaan

**BANDUNG (IM)** - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari meminta generasi milenial menjadi motor untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan. Sebab, di era globalisasi dan maraknya budaya luar yang masuk harus diimbangi dengan penguatan wawasan kebangsaan.

"Saya berharap mereka jadi motor untuk menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan di daerah masing-masing," kata Ineu di Hotel Nalendra Plaza Subang, Rabu (2/3).

Menurutnya, empat pilar kebangsaan yang terus disosialisasikan oleh pihaknya dapat memberikan dampak positif bagi penerus bangsa terutama generasi milenial. Sehingga, generasi milenial dapat mengimplementasikan empat pilar kebangsaan dan juga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal.

"Mereka harus bisa meng-



hadapi tantangan dengan hal yang positif. Jangan sampai terkontaminasi. Dan jangan sampai tidak memahami empat pilar kebangsaan," tuturnya.

Selain itu, Ineu berharap setiap organisasi maupun komunitas yang ada bisa memahaminya empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Jangan kemudian mereka menangkap mentah-mentah informasi dari luar yang

mungkin tidak sesuai dengan etika dan bermasyarakat di kita," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Subang, Maman Yudia menambahkan, sosialisasi empat pilar kebangsaan menjadi bekal terutama bagi milenial untuk hidup berbangsa dan bernegara dengan baik.

Pasalnya, saat ini kesadaran terhadap pengalaman Pancasila mulai berkurang dan adanya berita hoaks dapat mempengaruhi generasi milenial. Oleh



sebab itu, ideologi Pancasila harus digencarkan agar Bangsa Indonesia semakin mantap dengan persatuan dan kesatuan. "Di era globalisasi dan budaya asing yang masuk dapat menyebabkan pengaruh negatif lebih banyak. Dengan pembekalan empat pilar kebangsaan kepada pemuda agar lebih memfilter sehingga kondusivitas NKRI terus terjaga," tambah Maman.

"Di kita ada berbagai macam agama dan adat istiadat,

itulah yang harus dihargai oleh kita," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, peserta sosialisasi, Adang Pragustini (25), menilai sosialisasi empat pilar kebangsaan menjadi hal yang luar biasa. Sebab, sosialisasi tersebut dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada setiap individu.

"Harapannya ini tidak hanya dilakukan sekali saja tapi berkelanjutan agar lebih bisa mengedukasi banyak masyarakat," tutup Pragustini. ● lyls